

EVALUASI RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PENCAPAIAN TARGET				HAMBATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUDAH/BELUM DILAKSANAKAN		PENANGGUNG JAWAB
						TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV			SUDAH	BELUM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  - Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%						3,401,344,790			SEKRETARIS
			1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%						16,548,200			
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun (Renja dan Perjankin)	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	-		3,168,000	√		Kasubag Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			-		pada APBDP Anggaran di hapus	0			Kasubag Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
			3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen			1,775,000	√		Kasubag Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
			4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (LAKIP, SPM, LPPD)	3 Dokumen				3 Dokumen		4,990,800	√		Kasubag Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
			5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PMPRB	1 Dokumen				1 Dokumen		6,614,400	√		Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%						2,857,262,110			
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		2,730,019,010	√		Kasubag Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
			2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		122,280,000	√		Kasubag Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	-			1 Dokumen	penyusunan laporan di akhir tahun 2022	4,963,100	√		Kasubag Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
			3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%						2,978,900			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	100%			100%			2,978,900	√		Kasubag Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
			4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Difasilitasi	100%						182,205,975			
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		9,511,875	√		Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		51,001,300	√		Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset
			3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		9,998,600	√		Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset
			4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		3,175,200	√		Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		108,519,000	√		Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PENCAPAIAN TARGET				HAMBATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUDAH/BELUM DILAKSANAKAN		PENANGGUNG JAWAB
						TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV			SUDAH	BELUM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	<b>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>						<b>258,139,605</b>			
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		93,217,785	√		Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		164,921,820	√		Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset
			<b>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Usia Pakai/Manfaat Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>						<b>84,210,000</b>			
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	100%	53%	13.0%	17.0%	17.0%		47,840,000	√		Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset
			2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pendukung gedung kantor yang dipelihara	100%	-	40.0%		60.0%		24,120,000	√		Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pendukung gedung kantor yang dipelihara	100%				100.0%	Sub kegiatan di anggarkan pada APBDP	12,250,000	√		
			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>100%</b>						<b>6,945,000</b>			<b>Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>
			<b>1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di kota untuk dipulangkan ke kelurahan asal</b>	<b>100%</b>						<b>6,945,000</b>			
			1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah orang terlanter, korban trafficking, dan orang pekerja migran terlanter serta orang terlanter yang meninggal dunia yang mendapatkan pelayanan	7 OT dan 3 OT meninggal	5 OT	5 OT, 2 OTM	5 OT, 3 OTM	7 OT, 3 OTM	kegiatan menyesuaikan kasus yang terjadi	6,945,000	√		Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial
Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>10%</b>						<b>385,121,267</b>			<b>Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>
			<b>1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Untuk Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti</b>	<b>65%</b>						<b>142,613,267</b>			
			1. Penyediaan Permakanan	Jumlah orang dengan disabilitas berat yang menerima jaminan sosial	20 Orang	20 Orang	20 Orang				142,613,267	√		Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak
				Jumlah lanjut usia tidak berdaya yang menerima jaminan sosial	25 Orang	25 Orang	25 Orang							
				Jumlah anak terlanter yang menerima jaminan sosial	20 Orang	20 Orang	20 Orang							
				Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang menerima jaminan sosial	10 Orang	10 Orang	10 Orang	-	-					
			<b>2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti</b>	<b>65%</b>						<b>242,508,000</b>			
			1. Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah kasus yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam shelter	12 kasus pmks	2 kasus	5 kasus	8 kasus	8 kasus	kegiatan menyesuaikan kasus yang terjadi	9,804,000	√		
			2. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Eks Pasien Rumah Sakit Jiwa Terlanter yang mendapatkan pelayanan	45 Orang	-	-	19 orang	45 orang	kegiatan menyesuaikan kasus yang terjadi	232,704,000	√		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PENCAPAIAN TARGET				HAMBATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUDAH/BELUM DILAKSANAKAN		PENANGGUNG JAWAB
						TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV			SUDAH	BELUM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS/PMKS	75%						37,020,000			Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
			1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	65%						14,300,000			
			1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah penanganan kasus ABH	25 Kasus	10 kasus	16 kasus	23 kasus	25 kasus	kegiatan menyesuaikan kasus yang terjadi	14,300,000	√		
			2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kota	65%						22,720,000			
			1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Koordinator dan Pendamping PKH yang memberikan pelayanan	25 Orang	7 orang	6 orang	6 orang	6 orang		22,720,000	√		Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan
	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Dalam Skala Kota	100%						94,337,200			Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
			1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	70%						61,066,200			
			1. Penyediaan Makanan	Jumlah estimasi korban bencana dan pasca bencana yang menerima bantuan tanggap darurat	125 KK 625 jiwa	39 KK, 146 Jiwa	12 KK, 41 Jiwa	12 KK, 44 Jiwa	88 KK, 340 Jiwa	kegiatan menyesuaikan kasus yang terjadi	49,066,200	√		Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan
			2. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah KK dalam penanganan asistensi perlindungan dan jaminan sosial bagi orang fakir miskin dan tidak mampu dengan keterlantaran berat	10 KK fakir miskin	1 KK	2 KK	2 KK	5 KK	kegiatan menyesuaikan kasus yang terjadi	12,000,000	√		Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan
			2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	60%						33,271,000			
	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah anggota Tagana yang melaksanakan penanganan tanggap darurat dan peningkatan kapasitas Tagana	28 orang anggota Tagana	28 orang anggota Tagana	28 orang anggota Tagana	28 orang anggota Tagana	28 orang anggota Tagana		33,271,000	√		Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri	65%						68,583,800			Kepala Bidang Pemberdayaa Sosial dan penangan kemiskinan
			1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan PSKS dan LKS	97%						68,583,800			
			1. Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang mampu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	5 orang TKSK	5 orang TKSK	5 orang TKSK	5 orang TKSK	5 orang TKSK		18,000,000	√		
			2. Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS sebagai contoh Kemandirian dalam berusaha berdasarkan Kelembagaan	1 PSPK				1 PSPK	Sub kegiatan penanganan Stunting yang di anggaran pada APBDP	50,583,800	√		



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PENCAPAIAN TARGET				HAMBATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUDAH/BELUM DILAKSANAKAN		PENANGGUNG JAWAB
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV			SUDAH	BELUM	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12			13
	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak	Skor Penilaian Kota Layak	2.		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak	34%					88,705,500			Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						1.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	62%						
			1.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang berpartisipasi dalam forum anak daerah dan jumlah anak yang terpilih dalam pengurus inti	100 Orang		74 orang		26 orang	64,825,500	√			
					Dokumen Penilaian KLA	1 Dokumen		1 dokumen				√			
			2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga teknis, pejabat terkait, orang tua, tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan pengembangan layanan ramah anak	120 orang				120 orang	23,880,000	√			
	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak	Skor Penilaian Kota Layak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan Pelayanan secara Komperhensif	100%						33,940,000			Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			1.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi	90%					33,940,000				
			1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Komperhensif	30 kasus	8 kasus	18 kasus		4 kasus	kegiatan menyesuaikan kasus yang terjadi	33,940,000	√		
JUMLAH												4,357,684,655			

0

Singkawang,2022

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

  
SUHERBINTO, S.ST, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660514 199010 1 001